

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

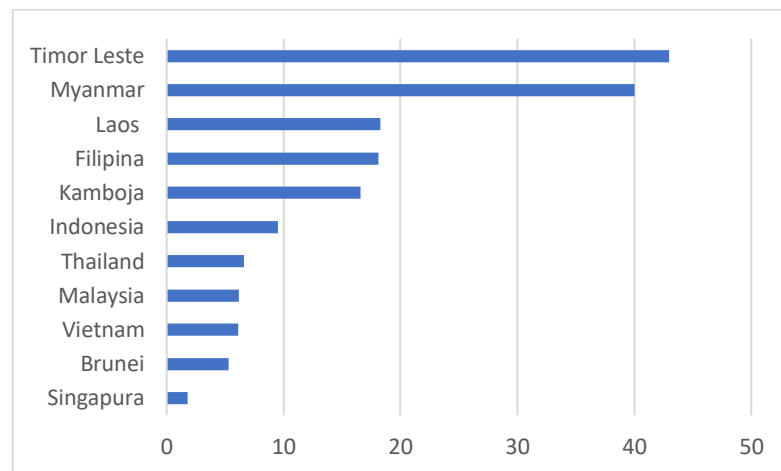
### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang aman serta sejahtera. Pembangunan nasional menjadi strategi negara dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih baik (Adhitya et al., 2022). Di Indonesia tujuan pembangunan nasional tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan umum menjadi tujuan utama suatu negara dan mencerminkan kondisi masyarakat yang baik, di mana mereka hidup dalam keadaan sehat, adil, dan makmur. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, maka semakin rendah angka kemiskinan, demikian pula sebaliknya (Solikatun et al., 2014).

Kemiskinan sendiri merupakan isu krusial yang menjadi fokus perhatian global dan nasional. Kemiskinan terjadi ketika individu atau kelompok tidak mampu memenuhi standar kebutuhan dasar secara ekonomi. Hal ini menjadi prioritas dalam tujuan pembangunan milenium (MDGs) yang dimulai tahun 2000, di mana pengurangan jumlah penduduk miskin menjadi tujuan pertama. Agenda ini kemudian dilanjutkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2015–2030, yang juga menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai isu utama, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia (Sianturi et al., 2021).

Tingginya tingkat kemiskinan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas dan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Ketika jumlah masyarakat miskin terlalu besar, maka potensi produktivitas nasional pun menurun. Individu yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki akses terbatas terhadap kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang memadai. Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap penyakit, memiliki tingkat pendidikan rendah, dan kurang terampil. Hal ini menciptakan *low human capital*, yang pada gilirannya menurunkan daya saing tenaga kerja dan produktivitas nasional secara keseluruhan (Setiawan & Jamaliah, 2023).

Dalam jangka panjang, tingginya angka kemiskinan juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena berkurangnya daya beli masyarakat, menurunnya konsumsi domestik, dan terbatasnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi yang produktif. Lebih jauh lagi, ketimpangan yang lebar antara kelompok miskin dan kaya dapat menciptakan instabilitas sosial dan menghambat pembangunan inklusif yang berkelanjutan. Permasalahan kemiskinan tidak hanya menjadi fokus nasional, tetapi juga menjadi tantangan besar di tingkat kawasan, khususnya di Asia Tenggara (Saribulan et al., 2023). Berikut tingkat kemiskinan di Asia Tenggara tahun 2023.



Sumber: Diolah 2023

**Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan di Kawasan Asia Tenggara 2023**

Gambar 1.1 data tingkat kemiskinan di Asia Tenggara tahun 2023, terdapat perbedaan yang signifikan antara negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan terendah. Timor-Leste menempati posisi tertinggi dengan tingkat kemiskinan mencapai 42%, diikuti oleh Myanmar dengan 40%. Tingginya angka kemiskinan di kedua negara ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik, konflik internal, serta keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap pendidikan dan layanan Kesehatan (Syahraniyah, 2016). Timor-Leste, sebagai negara yang baru merdeka, masih menghadapi tantangan dalam membangun ekonomi yang stabil, sementara Myanmar mengalami kemunduran ekonomi akibat krisis politik dan konflik bersenjata yang berkepanjangan. (Syahraniyah, 2016)

Di sisi lain, Singapura mencatat tingkat kemiskinan terendah di kawasan ini, yaitu hanya 1%. Kemiskinan yang rendah di Singapura dapat dikaitkan dengan kebijakan ekonomi yang efektif, sistem pendidikan dan kesehatan yang maju, serta pemerintahan yang stabil. Selain itu, Singapura juga memiliki sektor keuangan dan

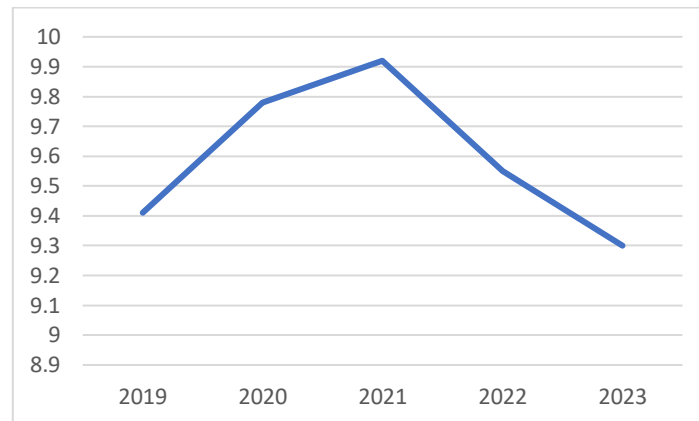
perdagangan yang sangat berkembang, yang menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi bagi warganya Faisal Lutfi et al., (2020). Brunei juga mencatat tingkat kemiskinan yang sangat rendah (di bawah 3%), didukung oleh pendapatan yang tinggi dari sektor minyak dan gas serta kebijakan kesejahteraan sosial yang baik dari pemerintah. (Robinson Sihombing et al., 2022).

Perbedaan ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu negara sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik, kebijakan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam, serta investasi dalam pembangunan manusia dan infrastruktur. Negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi membutuhkan dukungan internasional dan reformasi internal untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial mereka. Hal ini juga berlaku bagi Indonesia, yang meskipun mencatatkan penurunan tingkat kemiskinan.

Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar di ASEAN dan pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibanding Thailand dan Vietnam. Hal ini membebani penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Thailand sejak lama berhasil menekan pertumbuhan penduduk, dan Vietnam juga cukup efektif mengendalikannya pasca reformasi ekonomi. Dari sisi pendidikan, kedua negara ini berinvestasi besar pada pendidikan dasar dan vokasi yang sesuai kebutuhan industri, sehingga menciptakan tenaga kerja terampil. Infrastruktur mereka juga berkembang pesat, seperti pelabuhan, jalan, dan kawasan industri yang mendorong konektivitas dan investasi (Pinilih & Yulianti, 2016).

Kemudian meski TPAK Indonesia stabil, banyak tenaga kerja berada di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan sosial. Berbeda dengan Thailand dan Vietnam yang sukses mengalihkan tenaga kerja ke sektor manufaktur dan jasa melalui program vokasi dan industrialisasi. Dari sisi globalisasi, Thailand dan Vietnam lebih cepat membuka diri terhadap perdagangan dan investasi asing, mendorong ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal efektivitas pemerintahan, Thailand dan Vietnam lebih gesit dan konsisten dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, sementara Indonesia masih terkendala oleh birokrasi, korupsi, dan kebijakan yang tidak selalu tepat sasaran (Apresian, 2016).

Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dinamika kemiskinan. Seseorang dinyatakan miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan yang dianggap paling penting, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan serta pendidikan (Wulansari et al., 2023). Kemiskinan dapat menyebabkan rendahnya tingkat hidup penduduk sehingga kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari menjadi terbatas, tidak sedikit penduduk hidup dibawah garis kemiskinan, dan tidak sedikit juga penduduk hidup dibawah pendapatan yang rendah (Sembiring et al., 2023). Untuk melihat tren kemiskinan, berikut gambar yang menunjukkan kemiskinan di Indonesia tahun 2019-2023.



**Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)**

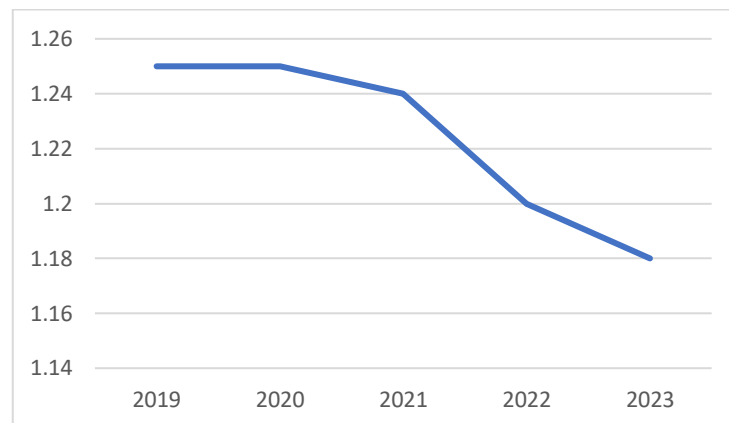
**Gambar 1. 2 Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2019-2023 (Persen)**

Berdasarkan gambar 1.2 terdapat perubahan angka kemiskinan di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Terlihat bahwa tingkat kemiskinan mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021. Setelah itu, tren menunjukkan penurunan dari tahun 2022 hingga 2023. Fenomena fluktuasi ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor penting. Peningkatan kemiskinan dari 2019 ke 2021 sangat mungkin disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal 2020. Pandemi tersebut menyebabkan pembatasan sosial, penutupan bisnis, PHK massal, dan penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan yang berdampak pada pendapatan masyarakat. Banyak orang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan, sehingga mendorong angka kemiskinan ke level tertinggi pada 2021.

Penurunan angka kemiskinan setelah 2021 kemungkinan disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi, pelonggaran pembatasan sosial, dan efektivitas program bantuan sosial pemerintah. Kebijakan stimulus ekonomi,

program vaksinasi yang berjalan baik, dan pembukaan kembali sektor-sektor ekonomi memungkinkan banyak orang untuk kembali bekerja atau memulihkan usaha mereka. Program bantuan seperti kartu prakerja, bantuan langsung tunai, dan subsidi untuk usaha kecil juga berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan hingga 2023, yang menunjukkan tren pemulihan ke kondisi pra-pandemi.

Tren fluktuasi ini menunjukkan bahwa kemiskinan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi dan kebijakan internal. Diperlukan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kebijakan sosial yang tepat untuk menekan kemiskinan ke depan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi (Fauzi et al., 2022). Peningkatan jumlah penduduk dapat menyediakan lebih banyak tenaga kerja, memperluas pasar bagi barang dan jasa, serta mendorong inovasi dan produktivitas ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang besar, konsumsi masyarakat meningkat, sehingga permintaan terhadap berbagai sektor ekonomi juga bertambah, yang pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menjadi faktor penghambat pembangunan. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai, tingginya jumlah penduduk dapat menyebabkan pengangguran, kemiskinan, serta tekanan terhadap sumber daya alam dan infrastruktur. Berikut gambar yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia.



Sumber: *World Bank* (2023)

**Gambar 1. 3 Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Indonesia  
Tahun 2019-2023 (Persen)**

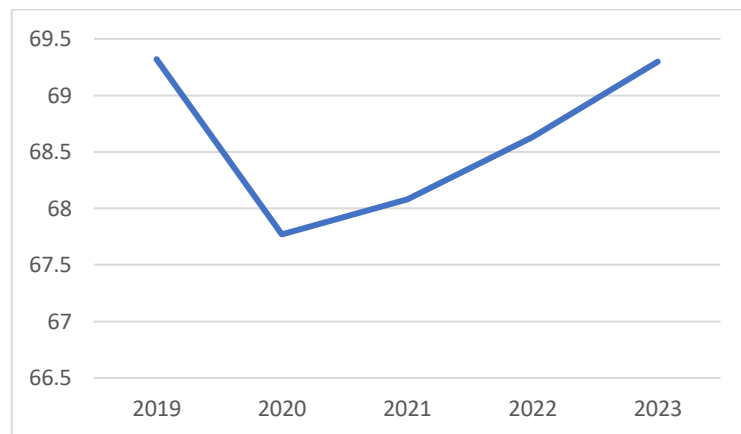
Berdasarkan gambar 1.3 tren pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 yang mengalami penurunan secara bertahap. Fenomena ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti penurunan angka kelahiran, peningkatan angka kematian, serta faktor migrasi (Christian et al., 2024). Fenomena yang terlihat dalam grafik ini adalah perlambatan laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal 2020 berpengaruh terhadap angka kelahiran dan kematian. Peningkatan angka kematian akibat COVID-19 serta penundaan pernikahan dan kehamilan selama masa pandemi berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan penduduk.

Kedua, keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang terus mendorong konsep keluarga kecil bahagia sejahtera. Program ini berhasil menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR) atau angka kelahiran total di Indonesia. Ketiga, peningkatan



tingkat pendidikan, terutama pada perempuan, dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga berkaitan dengan penurunan angka kelahiran. Faktor lain yang mungkin berkontribusi adalah urbanisasi yang meningkat, di mana masyarakat di perkotaan cenderung memiliki anak lebih sedikit dibandingkan di pedesaan karena biaya hidup yang lebih tinggi dan gaya hidup yang berbeda.

Seiring dengan fenomena perlambatan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, terdapat peningkatan dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Secara umum, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Fauziah et al., 2021). Semakin banyak jumlah angkatan kerja yang terserap, semakin besar potensi peningkatan pendapatan yang secara langsung dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. TPAK yang tinggi berkorelasi dengan rendahnya tingkat kemiskinan karena lebih banyak penduduk memiliki kesempatan untuk memperoleh pendapatan. Peningkatan partisipasi angkatan kerja harus didukung dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat miskin agar mereka mampu memperoleh pendapatan yang lebih baik, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan (Delviera & Amar, 2024). Berikut gambar yang menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia.



Sumber: *tradingeconomics*

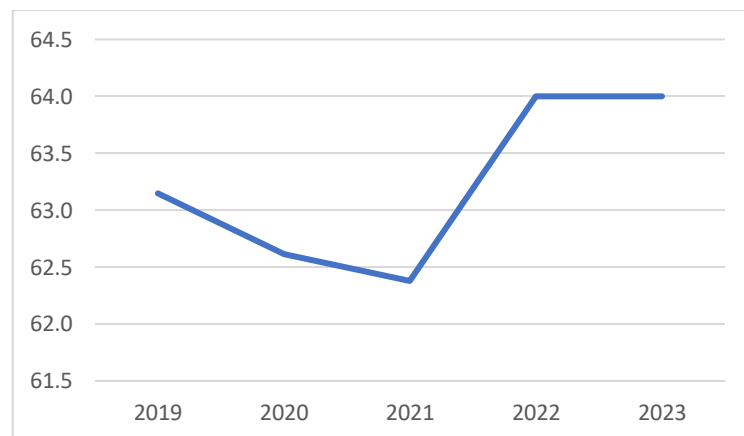
**Gambar 1. 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  
di Indonesia Tahun 2019-2023 (Persen)**

Berdasarkan gambar 1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penurunan TPAK setelah tahun 2019 dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan atau mengurangi jam kerja, sehingga mempengaruhi partisipasi angkatan kerja. Selain itu, faktor seperti kesempatan kerja yang terbatas, perubahan konsumsi rumah tangga, dan fluktuasi upah minimum juga berperan dalam perubahan TPAK. Peningkatan TPAK pada tahun 2023 menunjukkan pemulihan ekonomi pasca pandemi, dengan lebih banyak individu yang kembali memasuki pasar kerja. Faktor lain yang mempengaruhi TPAK meliputi pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyediakan lapangan pekerjaan, serta peningkatan tingkat pendidikan dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja (Novita & Samsuddin, 2024).

Selain itu, ada hal menarik yang mempengaruhi kemiskinan adalah indeks globalisasi. Globalisasi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik, dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan kemiskinan (Citra, 2022). Dari sisi positif, globalisasi membuka akses terhadap pasar internasional, mendorong investasi asing, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dan transfer teknologi. Globalisasi juga memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan melalui pertukaran informasi dan kerja sama internasional, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan. (Setyawan et al., 2021)

Namun, di sisi lain, globalisasi juga memiliki dampak negatif, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang memiliki keterampilan atau akses terhadap sumber daya ekonomi. Persaingan pasar yang semakin ketat dapat menyebabkan usaha kecil dan menengah kesulitan bersaing dengan perusahaan multinasional, yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka pengangguran. Selain itu, globalisasi dapat memperdalam kesenjangan ekonomi karena manfaat pertumbuhan ekonomi sering kali tidak merata, di mana kelompok masyarakat dengan akses terhadap pendidikan dan teknologi yang lebih baik cenderung mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan mereka yang kurang berpendidikan. Efek lainnya adalah ketidakstabilan ekonomi akibat ketergantungan terhadap pasar global, di mana krisis ekonomi di satu negara dapat berdampak luas terhadap negara lain, menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang dapat

memperburuk kondisi kemiskinan. krisis keuangan global tahun 2008 yang bermula di Amerika Serikat berdampak besar terhadap perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia, yang mengalami penurunan ekspor dan investasi asing (Purba et al., 2023). Di sisi lain, globalisasi juga membawa dampak positif. Misalnya, masuknya perusahaan teknologi asing seperti Google dan Microsoft ke India telah menciptakan jutaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan sektor digital. Negara-negara seperti Vietnam juga berhasil memanfaatkan globalisasi dengan menjadi pusat manufaktur elektronik global, yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan (Surajwancy, 2024). Berikut gambar yang menunjukkan indeks globalisasi di Indonesia.



Sumber: ETH Zurich

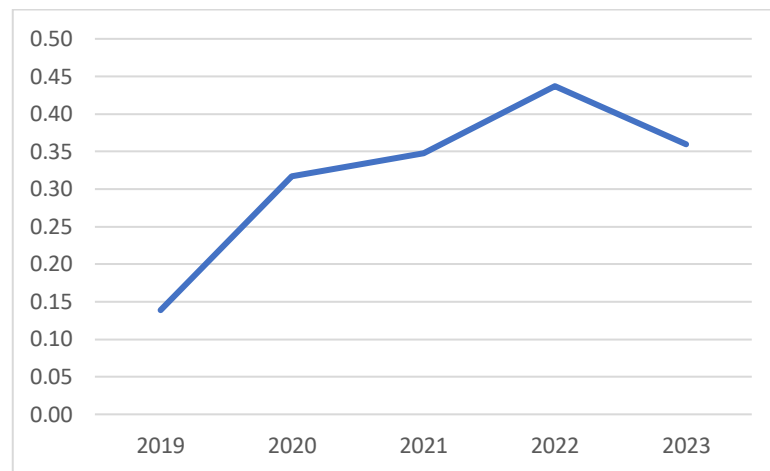
**Gambar 1. 5 Indeks Globalisasi di Indonesia Tahun 2019-2023**

Berdasarkan gambar 1.5 indeks globalisasi di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Terlihat adanya tren penurunan dari tahun 2019 hingga 2021, yang kemudian diikuti oleh peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan stabil hingga 2023. Penurunan ini sangat mungkin disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang memaksa banyak negara, termasuk Indonesia, menerapkan

pembatasan perjalanan internasional, penutupan perbatasan, dan pengurangan arus perdagangan global. Pandemi mengakibatkan gangguan pada rantai pasok global, penurunan investasi asing langsung, dan berkurangnya mobilitas manusia secara drastis. Berbagai kebijakan pembatasan sosial dan protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah selama 2020-2021 secara langsung berdampak pada keterhubungan Indonesia dengan ekonomi global.

Kenaikan tajam indeks globalisasi pada 2022 menandai fase pemulihan pasca-pandemi. Peningkatan ini didorong oleh pembukaan kembali perbatasan internasional, pelonggaran pembatasan perjalanan, pemulihan aktivitas perdagangan, dan penguatan kembali hubungan ekonomi global. Indonesia secara aktif terlibat dalam berbagai inisiatif multilateral dan regional, termasuk kepresidenan G20 pada 2022 yang meningkatkan keterlibatan globalnya. Stabilitas indeks pada 2023 menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai tingkat keterhubungan global baru yang lebih tinggi dan mampu mempertahankannya, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan geopolitik global (Dreher, 2003). Fenomena fluktuasi indeks globalisasi ini memperlihatkan bahwa proses globalisasi di Indonesia masih belum sepenuhnya stabil dan konsisten, terutama ketika dihadapkan pada krisis global maupun perubahan kebijakan internasional. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik domestik dapat memengaruhi derajat keterbukaan Indonesia terhadap dunia luar. Pemahaman ini menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global, sekaligus memastikan bahwa globalisasi memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional.

Di sisi lain, efektivitas pemerintah memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena menentukan bagaimana kebijakan ekonomi, sosial, dan pembangunan dijalankan. Secara umum, faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pemerintah dalam mengatasi kemiskinan meliputi kualitas kebijakan publik, stabilitas politik, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Pemerintah yang efektif mampu merancang dan mengimplementasikan program perlindungan sosial, pendidikan, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja guna meningkatkan daya saing masyarakat miskin. Selain itu, kebijakan fiskal yang tepat, seperti subsidi bagi kelompok rentan dan investasi dalam infrastruktur, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif Prasetyo, (2022). Namun, fenomena efektivitas pemerintah di Indonesia masih menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya jelas dan stabil. Meskipun terdapat berbagai upaya reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan transparansi, hasilnya belum sepenuhnya konsisten di berbagai sektor dan level pemerintahan. Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dicanangkan dan implementasi di lapangan, terutama dalam hal koordinasi lintas lembaga, efisiensi pelayanan publik, serta kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan nasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif pemerintah Indonesia dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi dan tantangan global yang terus berkembang.



**Sumber: World Bank (2023)**

**Gambar 1. 6 Efektivitas Pemerintah di Indonesia Tahun 2019-2023**

Berdasarkan gambar 1.6 efektivitas pemerintah Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Terlihat fenomena menarik dengan kenaikan signifikan dari 2019 hingga 2022, diikuti penurunan pada tahun 2023. Pada tahun 2019, indeks efektivitas pemerintah Indonesia berada di titik terendah. Terjadi peningkatan drastis pada tahun 2020 yang kemungkinan besar terkait dengan respons cepat pemerintah terhadap pandemi COVID-19 dalam bentuk kebijakan penanganan krisis kesehatan dan program perlindungan sosial. Kenaikan terus berlanjut meski lebih moderat pada 2021 mencerminkan adaptasi berkelanjutan terhadap tantangan pandemi, termasuk implementasi program vaksinasi nasional dan kebijakan pemulihan ekonomi.

Tahun 2022 menandai puncak efektivitas pemerintah. Peningkatan signifikan ini mungkin didorong oleh keberhasilan program pemulihan ekonomi pasca-pandemi, pencapaian kepresidenan G20 Indonesia, serta implementasi berbagai reformasi struktural termasuk UU Cipta Kerja. Pemerintah selalu berupaya

mengakselerasi perbaikan tata kelola pemerintah dan hukum. Namun, pada 2023 terjadi penurunan yang mungkin mencerminkan tantangan dalam mengelola dampak inflasi global, volatilitas harga komoditas, dan persiapan menghadapi siklus politik menjelang Pemilu 2024. Fluktuasi indeks ini menggambarkan dinamika kapasitas dan efektivitas pemerintah Indonesia dalam merespons berbagai tantangan, dari krisis kesehatan global hingga transformasi ekonomi dan reformasi birokrasi (Prasetyo, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terlihat bahwa dinamika pertumbuhan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks globalisasi, serta efektivitas pemerintah memiliki keterkaitan erat dengan kondisi kemiskinan di Indonesia. Kebaruan atau titik ketertarikan utama dalam penelitian ini terletak pada variabel indeks globalisasi dan efektivitas pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung lebih banyak menyoroti faktor ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, dan inflasi dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Namun, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih luas dengan memasukkan faktor globalisasi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik sebagai variabel yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, efektivitas pemerintah menjadi faktor penting yang sering diabaikan dalam analisis kemiskinan. Pemerintah yang efektif dapat mengimplementasikan kebijakan yang tepat sasaran dalam mengurangi kemiskinan. Sebaliknya, rendahnya efektivitas pemerintahan dapat menyebabkan inefisiensi birokrasi, korupsi, dan kebijakan yang kurang responsif terhadap masalah sosial.



Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks globalisasi, dan efektivitas pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 2000-2023. Dengan memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi masalah pokok adalah :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks globalisasi, dan efektivitas pemerintah secara parsial terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 2000-2023?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks globalisasi, dan efektivitas pemerintah secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 2000-2023?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks globalisasi, dan efektivitas pemerintah secara parsial terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 2000-2023.

2. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks globalisasi, dan efektivitas pemerintah secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 2000-2023.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam skripsi dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, khususnya dengan memasukkan variabel indeks globalisasi dan efektivitas pemerintah, yang masih jarang diteliti secara mendalam dalam konteks Indonesia.
- b. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara globalisasi, efektivitas pemerintah, dan kemiskinan dengan pendekatan yang lebih luas atau dalam periode yang berbeda.
- c. Menyediakan bukti empiris mengenai bagaimana keterkaitan antara pertumbuhan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, globalisasi, dan efektivitas pemerintah mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2023.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan, terutama terkait dengan

peningkatan efektivitas birokrasi dan optimalisasi manfaat globalisasi bagi masyarakat miskin.

- b. Membantu pemangku kepentingan, seperti akademisi, ekonom, dan pembuat kebijakan, dalam memahami faktor-faktor utama yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia sehingga dapat menyusun strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran.
- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi sektor swasta dan investor dalam memahami dinamika ekonomi dan sosial di Indonesia, terutama terkait dengan bagaimana globalisasi dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berdampak nyata dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang di akses di website *World Bank*, Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), *trading economics*, dan *ETH Zurich*.

